

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan sampah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan peran pemerintah sekaligus keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengembangkan Program Satu Desa Satu Bank Sampah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Program Satu Desa Satu Bank Sampah dikembangkan berdasarkan Instruksi Bupati Tahun 2023 yang mengarahkan setiap desa untuk membentuk satu unit bank sampah. Keberadaan bank sampah diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sejak dari sumbernya menjadi bagian penting karena dapat mengurangi jumlah sampah yang harus ditangani pada tahap akhir.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan target pembentukan 165 unit bank sampah yang disesuaikan dengan jumlah desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penetapan target tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keberadaan bank sampah di setiap desa diharapkan mampu meningkatkan

keterlibatan masyarakat sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Perkembangan pelaksanaan program sampai tahun 2026 menunjukkan bahwa lebih dari 150 bank sampah telah beroperasi di Kabupaten Bandung Barat. Persebaran bank sampah tersebut masih lebih banyak ditemukan di Kecamatan Lembang dan Kecamatan Cisarua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan program telah berjalan cukup baik dari sisi jumlah, tetapi pemerataan pelaksanaannya masih perlu mendapatkan perhatian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat melakukan pemetaan kembali terhadap persebaran bank sampah untuk mengetahui kondisi masing-masing wilayah serta mengidentifikasi desa yang masih membutuhkan pembentukan atau pengembangan bank sampah.

Pengembangan program juga melibatkan komunitas lingkungan yang berperan dalam mendampingi masyarakat pada proses pembentukan bank sampah. Pendampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola bank sampah sehingga keberadaannya dapat dipertahankan secara mandiri. Hasil pemetaan terhadap kondisi dan persebaran bank sampah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah yang menjadi prioritas pengembangan program pada tahap selanjutnya.

Bank sampah merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah yang menggabungkan kepentingan lingkungan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang dihasilkan warga terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenisnya sebelum disetorkan kepada pengelola. Sampah yang telah diterima

kemudian ditimbang dan dicatat untuk menentukan nilai yang dapat dimasukkan sebagai saldo tabungan bagi masyarakat. Sampah anorganik yang masih mempunyai nilai jual dapat disalurkan kepada pengepul maupun industri daur ulang. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos atau diolah melalui teknologi biokonversi dengan menggunakan maggot. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus membentuk kebiasaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengelolaan sampah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut mengatur pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat kemudian memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan di daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pengembangan program. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 350 peserta yang terdiri atas pegiat lingkungan, pengelola bank sampah, pengelola TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), serta perwakilan pemerintah desa dan kecamatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut diikuti dengan

upaya pengembangan dan penguatan fasilitas TPS3R. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolahan sampah di tingkat wilayah sebelum sampah yang tersisa diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir.

Kondisi persampahan di Kabupaten Bandung Barat masih menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditangani secara lebih serius. Data terverifikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025 mencatat timbulan sampah sekitar 763,13 ton per hari. Jumlah sampah yang telah mendapatkan penanganan hanya sekitar 0,07%, sedangkan sekitar 99,93% lainnya belum terkelola secara memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat dengan kemampuan pengelolaan yang tersedia.

Keterbatasan sarana pendukung di tingkat desa menjadi salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi pengelolaan sampah. Jumlah tenaga penyuluh dan tenaga teknis yang tersedia juga masih terbatas. Sistem pendataan dan digitalisasi yang belum berjalan secara optimal dapat menyebabkan informasi mengenai persebaran serta kapasitas bank sampah belum menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Keadaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan program agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Perencanaan memiliki kedudukan penting dalam administrasi publik karena menjadi dasar dalam menentukan arah suatu kegiatan atau program. Proses tersebut mencakup pengenalan terhadap masalah, penentuan tujuan, penyusunan alternatif tindakan, penetapan prioritas, serta penentuan sumber daya yang dibutuhkan.

Penetapan target 165 unit bank sampah, penguatan kelembagaan desa, pembangunan TPS3R, dan kegiatan pembinaan masyarakat merupakan beberapa bentuk keputusan yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dalam Program Satu Desa Satu Bank Sampah.

Perencanaan yang efektif diperlukan agar setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pembagian arah kerja yang jelas membantu setiap anggota memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan dalam kondisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen, tetapi juga menjadi pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Perencanaan dalam proses manajemen berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kualitas perencanaan berkaitan dengan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal. Organisasi membutuhkan perencanaan yang mampu memberikan arah sekaligus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan perubahan kondisi yang dihadapi.

Organisasi publik menghadapi kompleksitas yang berasal dari berbagai faktor, baik dari lingkungan eksternal maupun proses internal organisasi. Perencanaan yang telah dibuat tidak secara langsung menjamin bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan terhadap pelayanan publik, serta semakin kompleksnya aktivitas sumber daya manusia menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana.

Hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan adanya beberapa kondisi yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui enam kriteria efektivitas rencana, yaitu kegunaan rencana, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, serta ketepatan waktu.

Pertama, dari kriteria kegunaan, perencanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah yang menargetkan pembentukan 165 unit bank sampah sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan telah terbentuknya sekitar 155 unit bank sampah. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program, karena berdasarkan kondisi di lapangan tidak seluruh bank sampah yang telah dibentuk dapat beroperasi secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan program masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendampingan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya pelaksanaan program, sehingga efektivitas perencanaan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kedua, dari kriteria ketepatan dan obyektivitas, perencanaan program telah menetapkan target berdasarkan jumlah desa dan data timbulan sampah, namun ketepatan dan objektivitasnya masih menghadapi kendala. Keterbatasan sistem pendataan dan digitalisasi menyebabkan informasi sebaran dan kapasitas bank

sampah belum akurat. Selain itu, penentuan prioritas desa belum sepenuhnya berbasis pada analisis objektif seperti tingkat timbunan sampah, kepadatan penduduk, dan kesiapan masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan.

Ketiga, dari kriteria ruang lingkup, ruang lingkup program sudah mencakup berbagai kegiatan seperti pembentukan bank sampah, sosialisasi, pelatihan, serta pembangunan TPS3R. Namun demikian, kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi program masih perlu diperkuat. Beberapa aspek seperti digitalisasi data, pemasaran hasil daur ulang, serta sistem monitoring dan evaluasi belum optimal. Selain itu, koordinasi antar pihak masih belum sepenuhnya terpadu, dan implementasi kebijakan belum sepenuhnya konsisten dengan dukungan sumber daya yang tersedia.

Keempat, kriteria efektivitas biaya, program bank sampah pada dasarnya merupakan strategi yang efisien karena mampu mengurangi volume sampah dan memberikan manfaat ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas biaya masih menghadapi kendala akibat keterbatasan fasilitas, pendanaan, dan tenaga teknis. Di sisi lain, tingginya ketergantungan pada partisipasi masyarakat dan keterbatasan jumlah pengelola menyebabkan meningkatnya beban kerja dan potensi tekanan bagi pelaksana program.

Kelima, kriteria akuntabilitas, akuntabilitas program menunjukkan bahwa perencanaan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sementara implementasi melibatkan pemerintah desa, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Namun demikian, kejelasan pembagian tanggung jawab dalam

perencanaan dan pelaksanaan masih perlu diperkuat. Perbedaan kapasitas antar desa juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, sehingga diperlukan sistem koordinasi dan pengawasan yang lebih jelas dan terstruktur.

Keenam, kriteria ketepatan waktu, program ini memiliki target waktu yang jelas hingga tahun 2026, namun pencapaian yang masih terbatas menunjukkan adanya tantangan dalam kesesuaian waktu pelaksanaan. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah responsif seperti pemetaan ulang sebaran bank sampah, respons tersebut masih perlu diikuti dengan percepatan implementasi dan penyesuaian strategi agar target program dapat tercapai secara tepat waktu.

Keberhasilan Program Satu Desa Satu Bank Sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan target pembentukan unit, tetapi sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Tanpa perencanaan yang sistematis dan berbasis pada kondisi riil di lapangan, tujuan pengurangan sampah dan penguatan pengelolaan berbasis masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Dengan mengacu pada fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Fungsi Perencanaan Pada Program Satu Desa Satu Bank Sampah Tahun 2025 Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat”**.

Adapun ketertarikan peneliti dengan judul di atas dari sisi fokus penelitian, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas perencanaan program dengan menggunakan kriteria seperti kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, serta ketepatan waktu. Fokus ini dipilih karena

perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi program. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kualitas perencanaan yang telah disusun serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Dari sisi lokus penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dipilih karena merupakan instansi yang memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah, termasuk program Satu Desa Satu Bank Sampah. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat memiliki permasalahan persampahan yang cukup kompleks dengan timbulan sampah yang tinggi, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas perencanaan program berbasis masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini difokuskan sejauh mana kriteria penilaian efektivitas suatu rencana dalam Program Satu Desa Satu Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Penilaian efektivitas rencana tersebut mengacu pada kriteria menurut Handoko (2011:103) yaitu :

1. Kegunaan rencana
2. Ketepatan dan objektivitas.
3. Ruang lingkup
4. Efektivitas biaya.
5. Akuntabilitas
6. ketepatan waktu.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Perencanaan pada Program Satu Desa Satu Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Fungsi Perencanaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Fungsi Perencanaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penilaian efektivitas rencana dalam Program Satu Desa Satu Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi perencanaan dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Penilaian Efektivitas Rencana dalam pelaksanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan program pemerintah daerah. Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan analisis mengenai kriteria penilaian efektivitas rencana, seperti kegunaan (fleksibilitas, stabilitas, kontinuitas, dan kesederhanaan), ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, serta ketepatan waktu. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami bagaimana kualitas perencanaan mempengaruhi keberhasilan implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas perencanaan Program Satu Desa Satu Bank Sampah. Melalui analisis berdasarkan kriteria efektivitas rencana, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait peningkatan fleksibilitas dan keberlanjutan program, ketepatan penentuan sasaran, kelengkapan dan keterpaduan kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, kejelasan tanggung jawab, serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di tingkat desa.